

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* maka dipandang perlu adanya rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2016. Rencana kinerja ini dimaksudkan menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu satuan kerja, dan juga dapat digunakan pemerintah sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing satker.

Buku ini menyajikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Provinsi Papua Barat 2016 di tingkat Unit. Informasi yang ditampilkan meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Disajikan pula Rencana Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BPS Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016 ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Manokwari, 16 Juli 2015  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT

SIMON SAPARY

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Rencana Kerja Tahunan BPS Provinsi Papua Barat.....	1
Maksud, Tujuan, dan Penerima Manfaat (Eksternal BPS) dari Rencana Kegiatan/Aktivitas Teknis Badan Pusat Statistik yang akan Diselenggarakan pada Tahun 2016 .....	8

**RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS PROVINSI PAPUA BARAT**

**TAHUN 2016**

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
<b>T1 Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik</b> Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	75		
<b>1.1 Meningkatnya Kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS</b>			-----	
1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	75	<b><u>06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</u></b>	<b><u>11.398,048</u></b>
	Persen	75	<b><i>2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</i></b>	<b><i>11.398,048</i></b>
1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	100	01 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	25,296
			001 Penyusunan dan Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi dan Ukuran-Ukuran Statistik	0
1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Aktivitas	56	002 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web	18,812
1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu	Publikasi	13	003 Updating Peta Desa dan Blok Sensus	6,484
1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	1	06 Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus	48,3
1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu			010 Penyusunan Publikasi Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS2015	48,3
			17 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016	10.866,943
			039 Publisitas SE2016	114,710
			040 Pengembangan Website SE2016 Untuk Penyajian Hasil SE2016 dan Pembangunan Akses Online dan Layanan SE2016	-
			041 Listing Usaha/Perusahaan	10.422,131
			042 Penjaminan Kualitas SE2016	156,695
			043 PES SE2016	173,407
			20 Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup	457,509
			051 Uji Coba SBH2017	457,509

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
<b>1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)</b>			-----	
			<b>06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>	<b>4.567,124</b>
1.2.1 Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	99,72	<b>2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</b>	<b>4.567,124</b>
1.2.2 Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	Persen	99,36	04 Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	405,606
1.2.3 Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	98,93	007 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran	326,862
			008 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan	78,744
			009 Survei Upah dan Struktur Upah	0
			07 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	871,080
			011 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi	270,264
			012 SUSENAS Modul Kesehatan dan Perumahan	600,815
			08 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	384,72
			013 Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup	374,72
			014 Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB), Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)	6,7
			017 Penyusunan Statistik Politik Keamanan	3,3
			11 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	299,382
			018 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	188,248
			020 Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian	79,453
			022 Survei Perusahaan Perkebunan	31,681
			023 Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga	-

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			12 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	75,387
			024 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH	30,301
			025 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	17,212
			026 Survei Perusahaan Kehutanan	27,874
			13 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	474,248
			027 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	32,814
			028 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	66,644
			029 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	259,023
			030 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori	81,468
			031 Survei Konstruksi	24,299
			14 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	156,098
			032 Pembuatan Database Eksportir dan Pembeli Luar Negeri	43,380
			033 Survei Impor Daerah Perbatasan	-
			034 Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi	39,708
			035 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	50,862
			036 Survei Waktu Tunggu ( <i>Dwelling Time</i> ) di Pelabuhan	5,3
			037 Kompilasi Data Transportasi	16,848
			038 Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan Timbang	-
			16 Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan	188,804
			079 Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan	188,804
			18 Publikasi/Laporan Statistik Harga	801,583

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			045 Survei Statistik Harga Produsen	190,518
			046 Indeks Kemahalan Konstruksi	120,985
			047 Survei Harga Perdagangan Besar	137,079
			048 Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi	13,216
			049 Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras	144,419
			050 Survei Harga Perdesaan	195,365
			21 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	193,3
			053 Statistik Lembaga Keuangan	5,676
			054 Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal	6,97
			055 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	93,36
			056 Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,232
			057 Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi	2,432
			058 Penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Development Index)	2,6
			059 Survei IPTEK dan Inovasi	2,729
			060 Survei Bidang Jasa Pariwisata	31,246
			061 Survei Konsumsi Bahan Pokok	44,055
			062 Survei Pelintas Batas Penduduk Asing Pemegang KITAS	-
			22 Publikasi/Laporan Neraca Produksi	339,963
			063 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010=100 (SKTNP Barang)	12,481
			064 Implementasi SEEA Dalam Sisnerling Indonesia	-
			065 Penyusunan PDB Sektor Informal Menurut Lapangan Usaha	-
			066 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa)	13,56
			067 Penyusunan Matriks Trade And Transport Margin (TTM) Berbasis SNA 2008	-

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
			068 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100	310,922
			069 Penyusunan Matriks Supply Regional	3
			23 Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	361,41
			070 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses	54,84
			071 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA)	-
			072 Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (FSA)	-
			073 Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses	-
			074 Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses	-
			075 Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah	13,75
			076 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan	10,3
			24 Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	282,52
			077 Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen	15,543



Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
<b>T2 Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b>				
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	75		
<b>2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)</b>				
2.1.1 Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	75	<b>02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS</b>	<b>528,6</b>
2.1.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	12.000	<b>2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi</b>	<b>528,6</b>
2.1.3 Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	75	02 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100
2.1.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	75	003 Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi	-
			004 Pengadaan Peralatan Komunikasi	100
			03 Peralatan dan Fasilitas	428,6
			008 Pengadaan Meubelair	428,6
			<b>06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik</b>	<b>219,39</b>
			<b>2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</b>	<b>219,39</b>
			02 Laporan Diseminasi Statistik	117,11
			005 Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi	117,11
			006 Peningkatan Pelayanan (PNBP)	-
			03 Laporan Metadata Statistik	102,28
			004 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus	102,28
<b>T3 Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	70		
<b>3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</b>				
3.1.1 Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	7,84	<b>01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>6.139,57</b>
	Persen	82,38	<b>2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas</b>	<b>6.139,57</b>

Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Target	Program / Kegiatan / Output / Komponen	Anggaran (Juta Rupiah)
3.1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I <b>3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b> 3.2.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	70	<b><i>Teknis Lainnya BPS Provinsi</i></b> 01 Layanan Perkantoran 001 Belanja Pegawai 002 Belanja Barang Operasional 102 Penyusunan SHBJ  <b><u>01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</u></b> <b><i>2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</i></b> 01 Layanan Perkantoran 177 Penyelenggaraan Pembinaan SAKIP	6.139,57 3.834,819 2.304,75 6,448  <b><u>179,796</u></b>  <b><u>179,796</u></b>  179,796 179,796

**Maksud, Tujuan, dan Penerima Manfaat (Eksternal BPS) dari Rencana Kegiatan/Aktivitas Teknis Badan Pusat Statistik yang akan  
Diselenggarakan pada Tahun 2016**

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2900 PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI</b></p> <p><b>- PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI, KONSEP DEFINISI DAN UKURAN-UKURAN STATISTIK</b></p> <p>Menyempurnakan Klasifikasi, Konsep Definisi Dan Ukuran-Ukuran Statistik agar tercipta keseragaman interpretasi bagi petugas pengumpul, pengolah, penyaji data dan bagi para analis serta pengguna data lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai bahan acuan dalam penentuan perubahan kriteria urban/rural.</li> <li>- Untuk menyediakan klasifikasi pengeluaran rumah tangga yang berkesinambungan yang dapat digunakan di semua survei.</li> <li>- Untuk menyediakan paket program pencarian kode klasifikasi guna mempermudah pengguna publikasi klasifikasi.</li> <li>- Untuk menyediakan basis data lapangan usaha guna memperkaya informasi jenis lapangan usaha yang dapat ditambahkan dalam SPK.</li> <li>- Untuk lebih mengenalkan jenis-jenis klasifikasi yang ada, dan peningkatan pemahaman mengenai klasifikasi kepada pengguna klasifikasi, baik internal maupun eksternal BPS.</li> </ul>	<p>Kementerian/Lembaga/Badan/Dinas di Pusat dan Daerah; Pelaku usaha, peneliti, dan pengguna lainnya</p>
<p><b>- PENYUSUNAN INTEGRATED BUSINESS REGISTER(IBR)</b></p> <p>Mengintegrasikan berbagai sumber basis data ekonomi IBR baik dari sumber internal maupun eksternal sebagai infrastruktur penyediaan kerangka induk sektor institusi korporasi dan LNPRT khususnya digunakan dalam pelaksanaan sensus/survei BPS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya basis data yang up-to-date untuk penyusunan kerangka induk sensus/survei khususnya sektor institusi korporasi dan LNPRT.</li> <li>- Penyusunan klasifikasi baku unit institusi sebagai lanjutan dari penyusunan konsep definisi unit statistik.</li> <li>- Identifikasi cakupan dan implementasi pengklasifikasian unit institusi LNPRT pada</li> </ul>	<p>Kementerian/Lembaga/Badan/Dinas di Pusat dan Daerah; Pelaku usaha, peneliti, dan pengguna lainnya; Perusahaan, asosiasi, organisasi profesi</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
	<p>tingkap propinsi melalui capacity building model statistik ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergi dan koordinasi data yang baik yang melibatkan stakeholder internal subject matter BPS dan eksternal lembaga administratif.</li> <li>- Pemanfaatan basis data IBR untuk berbagai pengguna internal dan eksternal BPS.</li> </ul>	
<p><b>- UPDATING PETA DESA DAN BLOK SENSUS</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan master area frame wilayah kerja statistik. Wilayah kerja statistik terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus.</p>	<p>Terciptanya peta desa/kelurahan dan blok sensus serta peta digital yang mutakhir</p>	<p>Masyarakat luas pengguna data BPS</p>
<p><b>2897 PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN DISEMINASI INFORMASI STATISTIK</b></p>		
<p><b>- PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL DAN KHUSUS</b> Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem rujukan statistik sangat perlu dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan UU no 16 tahun 1997.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini</li> <li>b. Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan statistik</li> <li>c. Tersusun dan tersebarluaskannya piranti lunak aplikasi di tempat strategis sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait</li> <li>d. Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan statistik</li> </ul>	<p>Kementrian/Lembaga Pemerintah dalam hal konsultasi dan rekomendasi Kegiatan Statistik; SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal konsultasi dan rekoomendasi kegiatan statistik; Swasta</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p>- <b>PENINGKATAN KUALITAS DAN LAYANAN PUBLIKASI</b>            memberikan pelayanan internal kepada subject matter produsen publikasi (penomoran publikasi, cover, sistem mailing list, SPRP, dan katalog) memberikan pelayanan internal kepada unit-unit kerja yang melakukan pelayanan langsung ke konsumen data, yaitu subdit perpustakaan dan dokumentasi statistik dan subdit layanan dan promosi statistik (sistem informasi publikasi, program entri publikasi) memberikan pelayanan kepada konsumen data (penyusunan berbagai publikasi, program ARC, infografis, DDA yang semakin berkualitas, sosialisasi perka publikasi, BRS yang efektif)</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan layanan publikasi</p>	<p>Instansi pemerintah,            Para eksekutif,            Masyarakat yang menerima publikasi melalui mailinglist publikasi;            Seluruh masyarakat dunia dengan tersedianya berbagai publikasi BPS di public domain (website BPS).</p>
<p>- <b>PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DOKUMENTASI KOLEKSI DAN LAYANAN DATA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya basis data perpustakaan sebagai pendukung layanan informasi publik</li> <li>2. Terciptanya sistem pendukung layanan informasi yang berbasis teknologi dan internet</li> <li>3. Terkelolanya database perpustakaan dengan baik</li> <li>4. Tersusunnya komposisi ideal pada struktur pelayanan pada unit pelayanan publik</li> <li>5. Membentuk sebuah indikator kinerja perpustakaan/ Library Performance Indicators yang berguna dalam menentukan batasan kinerja sebuah perpustakaan baik di BPS Pusat maupun BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya standar pelayanan informasi terhadap pengguna data statistik yang berkesinambungan</li> <li>2. Terbentuknya standar Sistem Pelayanan Terpadu</li> <li>3. Terciptanya evaluasi Standar Pelayanan Perpustakaan secara rutin per tahun</li> <li>4. Terciptanya sistem pelayanan informasi yang profesional di BPS</li> <li>5. Terciptanya sistem pelayanan informasi yang sesuai dengan tuntutan pengguna dan tuntutan perkembangan zaman</li> <li>6. Terciptanya dukungan sistem layanan informasi statistik yang cepat, mudah murah dan up to date</li> <li>7. Terbangunnya model interoperabilitas aplikasi digital library yang dapat berinteraksi dengan sistem lain untuk masa kini dan mendatang</li> </ol>	<p>Masyarakat luas pengguna data BPS</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENINGKATAN PELAYANAN (PNBP)</b> mendorong perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melengkapi koleksi perpustakaan dalam format digital.</p>	<p>8. Terbangunnya sistem literasi yang handal dalam kegiatan pelayanan informasi publik di BPS Pusat maupun BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten/Kota</p> <p>a. Tercapainya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini</p> <p>b. Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan statistik</p> <p>c. Tersosialisasikannya aplikasi SIRuSa sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait</p> <p>d. Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan statistik</p>	<p>1. Eksternal BPS;</p> <p>2. Pengguna data BPS;</p> <p>3. Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam hal konsultasi dan rekomendasi Kegiatan Statistik;</p> <p>4. SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal konsultasi dan rekomendasi kegiatan survei statistik sektoral;</p> <p>5. Pihak Swasta, Peneliti, dan Perorangan dalam hal konsultasi kegiatan statistik</p>
<p><b>2901 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI STATISTIK</b></p> <p><b>- INTEGRASI PENGOLAHAN DATA TERPADU</b> Untuk memberikan sistem pengolahan data terpadu sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan tepat waktu.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas program pengolahan data yang berkelanjutan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas data statistik</p> <p>3. Meningkatkan ketepatan waktu pengolahan data dengan adanya ragam model pengolahan data sesuai kebutuhan</p> <p>4. Mewujudkan metadata statistik yang baik sebagai penunjang penyajian data statistik.</p>	<p>Masyarakat umum pengguna data BPS</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan layanan koneksi Intranet/VPN</li> <li>2. Meningkatkan layanan koneksi Internet</li> <li>3. Meningkatkan layanan koneksi Ekstranet</li> <li>4. Merawat infrastruktur data center dan pendukungnya</li> </ol>	-	<p>Secara umum layanan jaringan komunikasi data dan akses online beroperasi selama 24 jam selama 7 hari yang dapat digunakan oleh masyarakat umum baik dalam maupun luar negeri; akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi ekstranet adalah: Aplikasi pertukaran data antara BPS dan unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). Aplikasi pertukaran data antara BPS, Bank Indonesia, Bea cukai dan Pajak. Aplikasi pertukaran data antara BPS dan Badan Informasi Geografi (BIG); Layanan jaringan komunikasi data dan akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi internet adalah: Website bps.go.id dan kantor BPS daerah. Website lpse.bps.go.id</p>
<p><b>- PENGEMBANGAN LAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN AKSES ONLINE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Infrastruktur Data Center BPS</li> <li>2. Meremajakan dan meningkatkan kapasitas LAN BPS</li> <li>3. Meremajakan dan meningkatkan kapasitas server, storage, dan perangkat jaringan Data Center</li> <li>4. Mengadakan peralatan sistem back up DC</li> <li>5. Mengadakan server, storage, dan perangkat jaringan Data Recovery Center</li> </ol>	-	<p>Secara umum layanan jaringan komunikasi data dan akses online beroperasi selama 24 jam selama 7 hari yang dapat digunakan oleh, masyarakat umum baik dalam maupun luar negeri.; Layanan jaringan komunikasi data dan akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi ekstranet adalah: Aplikasi pertukaran data antara BPS dan unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). Aplikasi pertukaran data antara BPS, Bank Indonesia, Bea cukai dan Pajak. Aplikasi pertukaran data antara BPS dan Badan Informasi Geografi (BIG);</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN REKAYASA INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas sistem informasi.</li> <li>2) Meningkatkan kualitas SDM.</li> <li>3) Menyediakan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan</li> <li>4) Melakukan penyusunan spesifikasi dan kebutuhan untuk keperluan pengadaan komputer dan alat penunjang lainnya.</li> <li>5) Melakukan perawatan computer, notebook, printer dan alat pendukung lainnya.</li> <li>6) Menyusun repository data dan meta data supaya mudah diakses oleh pengguna.</li> <li>7) Melakukan pelayanan lainnya terkait dalam bidang TI</li> <li>8) Mempermudah pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer</li> <li>9) Meningkatkan ketersediaan data warehouse yang mudah diakses</li> <li>10) Melindungi Komputer dan Notebook dari virus yang merugikan</li> <li>11) Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen sesuai dengan peningkatan kebutuhan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendapatkan SDM yang berkualitas</li> <li>b. memperoleh Perangkat lunak (Software) yang sesuai kebutuhan</li> <li>c. melaksanakan Layanan yang prima terutama dalam perawatan komputer dan alat penunjang lainnya .Pengelolaan data yang profesional</li> <li>d. menghasilkan Sistem repository data dan software yang mudah diakses.</li> <li>e. memperoleh sistem Program entry data atau proses scanning yang 'user friendly'</li> <li>f. memperoleh hasil Penilaian usulan angka kredit Pejabat Fungsional dan tim penilai dapat dipermudah laporannya</li> <li>g. menyediakan Teknologi data warehouse dan business intelligence yang mencakup data-data penting BPS yang dapat digunakan oleh User, baik</li> <li>h. Meningkatkan fasilitas untuk pengelolaan informasi manajemen sesuai dengan peningkatan kebutuhan</li> </ol>	<p>Layanan jaringan komunikasi data dan akses online yang dapat digunakan oleh pengguna di luar BPS dengan menggunakan koneksi internet adalah: Website bps.go.id dan kantor BPS daerah. Website lpse.bps.go.id</p> <p>Pelajar/Mahasiswa, Dunia usaha, Pendidikan, Pengambil kebijakan dan lain-lain</p>



Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2905 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN</b></p> <p><b>- PENGHITUNGAN PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA UNTUK PENIMBANG SURVEI KEPENDUDUKAN</b></p> <p>Melakukan estimasi jumlah penduduk dan rumah tangga menurut kabupaten/kota untuk digunakan sebagai penimbang survei Kependudukan (Susenas dan Sakernas) dan Dana Alokasi Umum (DAU)</p>	<p>Tersedianya jumlah penduduk dan rumah tangga menurut Kabupaten/kota per triwulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan;</li> <li>2. Kementerian Tenaga Kerja</li> </ol>
<p><b>- PENYUSUNAN PUBLIKASI PROFIL PENDUDUK INDONESIA HASIL SUPAS2015</b></p> <p>Menganalisis karakteristik demografi, sosial dan ekonomi penduduk Indonesia</p>	<p>Tersedianya informasi terkait karakteristik demografi, sosial dan ekonomi penduduk Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Kementerian Kesehatan;</li> <li>3. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li> <li>4. Kementerian Ketenagakerjaan;</li> <li>5. Kementerian Agama;</li> <li>6. Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>7. Kementerian Sosial; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>8. BKKBN;</li> <li>9. Kementerian Peranan Wanita;</li> <li>10. Pengguna Statistik Kependudukan</li> </ol>
<p><b>- PENYUSUNAN PUBLIKASI PROFIL PENDUDUK PROVINSI HASIL SUPAS2015</b></p> <p>Menganalisis karakteristik demografi, sosial dan ekonomi penduduk provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia</p>	<p>Tersedianya informasi terkait karakteristik demografi, sosial dan ekonomi penduduk provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia</p>	<p>Bappeda; Dinkes; Dikbud; Disnaker; kanwil Depag;</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN PARAMETER DEMOGRAFI</b></p> <p>-</p>	<p>Untuk memperoleh gambaran ukuran demografi yang berguna untuk melihat keberhasilan program pemerintah yang telah dilaksanakan dan perencanaan di masa mendatang</p>	<p>Pemda Prov dan Kab/Kota; Kanwil Depsos; Pengguna Statistik Kependudukan</p> <p>Bappeda; Dinkes; Dikbud; Disnaker; Kanwil Depag; Pemda Prov dan Kab/Kota; Kanwil Depsos; Pengguna Statistik Kependudukan</p>
<p><b>- SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN</b></p> <p>-</p>	<p>Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester. Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.</p>	<p>1. Kementerian/Lembaga; 2. ILO; 3. Akademisi; 4. Kedutaan Besar; 5. Organisasi Swasta; 6. Masyarakat umum</p>
<p><b>- SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN</b></p> <p>-</p>	<p>Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap tahun Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat provinsi maupun nasional.</p>	<p>1. Kementerian/Lembaga; 2. ILO; 3. Akademisi; 4. Kedutaan Besar; 5. Organisasi Swasta; 6. Masyarakat Umum</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI SEKTOR INFORMAL</b></p> <p>Untuk mendapatkan data statistik sektor informal yang hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi maupun ketenagakerjaan.</p>	<p>Mengumpulkan data penduduk yang bekerja pada sektor informal maupun pekerjaan informal, dengan estimasi tingkat nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian/Lembaga;</li> <li>2. ILO;</li> <li>3. Akademisi;</li> <li>4. Organisasi Swasta;</li> <li>5. Masyarakat luas</li> </ol>
<p><b>- SURVEI UPAH DAN STRUKTUR UPAH</b></p> <p>-</p>	<p>Survei Upah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk mendapatkan informasi/data statistik upah buruh di bawah pengawas/mandor yang berkesinambungan, secermat dan sedini mungkin,</li> <li>2) Untuk memperoleh gambaran taraf kesejahteraan masyarakat pada umumnya,</li> <li>3) Untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan, pengendalian, dan analisis upah pekerja/karyawan di tingkat nasional dan regional</li> </ol> <p>Survei Struktur Upah (SSU):</p> <p>Untuk mendapatkan informasi/data statistik upah yang lebih rinci antara lain, upah per jenis jabatan/pekerjaan dan jenis kelamin, untuk karyawan non-produksi/non-pelaksana, karyawan produksi/pelaksana di bawah pengawas/mandor/supervisor, dan karyawan produksi/pelaksana pada tingkat pengawas/mandor/supervisor ke atas.</p> <p>Data hasil SSU yang dikumpulkan secara berkala diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat untuk memantau perkembangan upah per jenis jabatan dan jenis kelamin di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan di tingkat</p>	<p>Ketua Bappenas;</p> <p>Sekretaris Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Industri;</p> <p>Barembang, Kementerian Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi;</p> <p>Dir. Jaminan Sosial, Pengupahan dan Kesejahteraan, Kemenakertrans;</p> <p>Direktur Stat. dan Analisis Ekonomi BAPPENAS;</p> <p>Perpustakaan BAPPENAS;</p> <p>Perpustakaan PDII - LIPI;</p> <p>Kepala Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional;</p> <p>Perpustakaan International Labour Organization Office (ILO);</p> <p>The Asean Sekretariat;</p> <p>The World Bank Resident Staff in Indonesia;</p> <p>International Monetary Fund (IMF) C/O Bank Indonesia;</p> <p>Lembaga Penelitian SMERU;</p> <p>Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);</p> <p>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);</p> <p>Dir. Lembaga Demografi Fak. Ekonomi Univ. Indonesia;</p> <p>L P E M Universitas Indonesia;</p> <p>Dewan Pengupahan, Kemenakertrans;</p> <p>Sudir. Analisis Inf. Pengupahan &amp; Jamsos, Ditjen PHI &amp; Jamsos,</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
	nasional.	Kemenakertrans; Sudir. Program, Evaluasi dan Pelaporan, Ditjen PHI & Jamsos, Kemenakertrans; Puslitbang Ketenagakerjaan- Balitfo, Kemenakertrans; Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Kemenakertrans; Bank Indonesia (Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter); UNFPA OFFICE
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK PENDAPATAN</b></p> <p>1) Menyajikan data dan informasi mengenai persebaran pekerja bebas menurut karakteristik sosial dan demografi, 2) Menyajikan data dan informasi mengenai tren rata-rata pendapatan pekerja bebas menurut karakteristik sosial dan demografi</p>	-	<p>Kabag. Arsip &amp; Dokumentasi Perpustakaan SEKNEG; Ketua Bappenas; Dir. Jaminan Sosial, Pengupahan dan Kesejahteraan, Kemenakertrans; The World Bank Resident Staff in Indonesia; Perpustakaan International Labour Organization Office (ILO); Dir. Lembaga Demografi Fak.Ekonomi Univ. Indonesia; L P E M Universitas Indonesia; Dewan Pengupahan, Kemenakertrans; Perpustakaan Pusdiklat, BPS</p>
<p><b>- PENYUSUNAN PUBLIKASI PROFIL MIGRAN HASIL SUSENAS</b></p> <p>(1) Untuk memberikan gambaran mengenai pola dan arus migrasi antar provinsi di Indonesia (2) Untuk memberikan gambaran mengenai profil migran dilihat dari berbagai karakteristik.</p>	Untuk memberikan informasi mengenai migrasi secara berkesinambungan setiap tahun.	Masyarakat atau mahasiswa (yang membutuhkan informasi mengenai statistik migrasi); Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),; Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI); Pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan yang terkait dengan masalah

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PILOT SURVEI MIGRASI II DI 5 PROVINSI</b></p> <p>(1) Menguji kelayakan instrumen pencacahan yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi pilot survei migrasi I,</p> <p>(2) Memilih metode sampling yang tepat agar mendapatkan sampel yang representatif,</p> <p>(3) Memilih metode pengumpulan data yang efektif dan efisien agar dapat selesai tepat waktu, dan</p> <p>(4) Untuk mendapatkan strategi organisasi lapangan yang efektif.</p>	<p>Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan rekomendasi pilot survei migrasi I, dimana masih dirasa perlu untuk melakukan pilot survei migrasi II agar diperoleh kesempurnaan dalam pelaksanaan survei migrasi secara berkesinambungan di masa mendatang.</p>	<p>migrasi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);  Pengambil keputusan dan kebijakan yang terkait dengan masalah migrasi di DPR;  Pusat Pelayanan Informasi Perpustakaan Nasional, PERPUSNAS;  ARSIP Nasional</p> <p>1. Masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan sebagai bahan rujukan,;  2. Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),;  3. Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI), ;  4. Kementerian/lembaga terkait seperti: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Kemenakertrans, Kemendagri, dan Bappenas,</p>
<p><b>- PENYUSUNAN PUBLIKASI STATISTIK MIGRASI INDONESIA DAN PER PROVINSI (33 PROVINSI) HASIL SUPAS</b></p> <p>Untuk menyajikan secara lengkap besaran dan arus migrasi internal secara nasional dan masing-masing provinsi. Selain itu juga menyajikan karakteristik dari pelaku migrasi.</p>	<p>Untuk menjembatani kelangkaan penyajian data migrasi. Lebih jauh lagi, dapat membantu menjawab permasalahan kependudukan seperti komposisi penduduk, disparitas penduduk, dan kepadatan penduduk, serta dapat dipakai untuk menyusun kebijakan kependudukan di Indonesia.</p>	<p>1. Masyarakat atau mahasiswa (yang membutuhkan informasi mengenai statistik migrasi),  2. Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  3. Peneliti mengenai migrasi di Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI),  4. Pembuat kebijakan dan perencanaan pembangunan yang terkait dengan masalah migrasi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),  5. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil),  6. Pengambil keputusan dan kebijakan yang terkait dengan masalah migrasi di DPR,</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2906 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  <b>- SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI</b></p> <p>Memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya untuk penyediaan data tingkat kemiskinan dalam interval waktu yang lebih pendek (dari sebelumnya sekali setahun menjadi dua kali setahun).</p> <p><b>- SUSENAS PANEL</b></p> <p>Agar data sosial ekonomi sedapat mungkin sejalan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. Data yang dihasilkan pada Susenas Modul Konsumsi tidak dapat melihat pola konsumsi dan pola pergeseran miskin-hampir miskin pada rumah tangga dari Bulan Maret 2012 ke Bulan Maret 2015, pola konsumsi dan pergeseran tersebut hanya dapat dilihat dengan menggunakan data Susenas Panel. Pola konsumsi rumah tangga yang dihasilkan dari data Susenas Panel selalu untuk melihat pergeseran penduduk miskin-hampir miskin juga sangat berguna untuk keperluan penghitungan PDB</p> <p><b>- STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA DAN STATISTIK PEMUDA</b></p> <p>Memberikan gambaran rinci dan menyeluruh</p>	<p>1. Mengumpulkan data kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kemiskinan, perjalanan &amp; kriminalitas, dan perlindungan sosial.</p> <p>2. Mengumpulkan data konsumsi dan perjalanan.</p> <p>3. Mengumpulkan data perlindungan sosial.</p> <p>Membuat laporan final untuk kegiatan pengumpulan data yang sudah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015.</p> <p>Menyajikan penduduk lanjut usia dan pemuda dari</p>	<p>7. Pusat Pelayanan Informasi Perpustakaan Nasional, PERPUSNAS, 8. ARSIP Nasional</p> <p>pemerintah pusat dan daerah; organisasi swasta; akademisi; lembaga penelitian; masyarakat luas</p> <p>1. Pemerintah; 2. Swasta; 3. Lembaga Internasional; 4. Akademisi</p> <p>Kementerian Perencanaan Pembangunan</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p>mengenai kuantitas, kualitas dan tingkat kesejahteraan sosial penduduk lanjut usia dan pemuda di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun provinsi.</p>	<p>sisi demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan program pemberdayaan pemuda.</p>	<p>Nasional/BAPPENAS; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Sosial; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Kesehatan; BKKBN; Komnas Lansia; WHO; UNICEF; UNFPA</p>
<p><b>- STATISTIK PENDIDIKAN</b></p> <p>Untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi kepada pengguna data baik itu pembuat kebijakan, pemerhati dunia pendidikan dan lain-lain.</p>	<p>Untuk menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitor dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan, sosial dan budaya</p>	<p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Sosial; Kementerian Agama; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; UNESCO; UNICEF; ESCAP</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI KHUSUS DISABILITAS</b></p> <p>Menjalankan amanah CRPD</p> <p>Sebagai persiapan untuk pemenuhan kewajiban melaporkan data prevalensi penduduk penyandang disabilitas pada tahun 2017 karena Indonesia ikut menandatangani Incheon Strategi</p> <p>Mengimplementasikan hasil pengembangan kuesioner dan konsep definisi disabilitas yang telah mengacu kepada CRPD, dan mengadopsi pertanyaan yang direkomendasikan oleh Washington Group on Disabilities, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.</p>	<p>Mengumpulkan informasi mengenai penyandang disabilitas melalui survei dengan pendekatan rumah tangga.</p>	<p>Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>
<p><b>- PROFIL KESEHATAN IBU DAN ANAK</b></p> <p>Publikasi yang berisi gambaran tentang kesehatan ibu dan anak di Indonesia.</p>	<p>Memberikan gambaran secara rinci mengenai kesehatan ibu, kesehatan anak, perilaku hidup sehat dan gambaran kondisi sosial ekonomi rumah tangga di Indonesia.</p>	<p>Kementerian Kesehatan; Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Kemeng PPN (Bappenas); Akademisi; Peneliti Bidang Kesehatan</p>
<p><b>- INDIKATOR PERUMAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN</b></p> <p>Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2015 merupakan publikasi rutin yang terbit dua tahun sekali guna menyediakan data mengenai perumahan dan lingkungan yang berkelanjutan.</p>	<p>Menyajikan gambaran kondisi perumahan dan kesehatan lingkungan pada tingkat nasional dan provinsi. Di samping itu, pada publikasi ini juga disajikan beberapa data sektor untuk melengkapi analisisnya.</p>	<p>Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kemeng PPN (Bappenas); Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Akademisi; Peneliti Bidang Lingkungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>



Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SUSENAS MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN</b> menyediakan data mengenai kesehatan dan perumahan yang lebih rinci.</p>	<p>Pengumpulan data indikator sosial ekonomi dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga, yaitu: a. Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, perumahan, dan pengeluaran. b. Data kesehatan dan perumahan mencakup keterangan mengenai kesehatan masyarakat secara umum yang meliputi status kesehatan, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan, biaya kesehatan, kesehatan ibu dan anak, kondisi rumah, sanitasi lingkungan dan sumber air bersih.</p>	<p>Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kemendagri (Bappenas); Peneliti Bidang Kesehatan; Peneliti Bidang Perumahan dan Lingkungan; Akademisi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p><b>2907 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL</b> <b>- PENYUSUNAN STATISTIK MODAL SOSIAL</b> Memberikan informasi besaran modal sosial dalam masyarakat Indonesia dalam tiga kelompok indikator, yaitu sikap percaya dan toleransi, keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal, serta aksi bersama. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif tentang pentingnya modal sosial dalam pembangunan.</p>	<p>Menyajikan data dan informasi terkait kondisi modal sosial masyarakat Indonesia menurut provinsi. Serta 1). Menyediakan data dan informasi terkait sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku, keanggotaan dalam kelompok/organisasi dan jejaring lokal serta aksi bersama dalam kehidupan masyarakat, 2). Menyediakan data dan informasi terkait indeks komposit modal sosial menurut provinsi, 3). Memberikan gambaran umum mengenai hubungan modal sosial dan kemajuan pembangunan suatu wilayah.</p>	<p>Instansi pemerintah (kementerian dan lembaga); Kalangan dunia usaha; Kalangan akademisi; Kalangan peneliti; Masyarakat luas</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI NILAI KEBANGSAAN</b></p> <p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait pengamalan sikap positif yang mencerminkan nilai kebangsaan yang melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Bagi pemerintah, hasil Survei Nilai Kebangsaan sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih terarah dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilestarikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.</li> <li>2. Mengetahui sikap positif terkait nilai kebangsaan yang masih melekat dalam diri masyarakat.</li> <li>3. Mendapatkan data awal (baseline) nilai kebangsaan untuk dipantau perkembangannya di masa depan</li> </ol>	<p>Pemerintah; Peneliti dan Akademisi</p>
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SLHI)</b></p> <p>Menyajikan informasi dan data yang dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun data statistik lingkungan</li> <li>2. Mengidentifikasi permasalahan data lingkungan</li> <li>3. Memberikan gambaran perbandingan data lingkungan antar wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga);</li> <li>2. Para pembuat kebijakan;</li> <li>3. Akademisi dan peneliti;</li> <li>4. Masyarakat umum</li> </ol>
<p><b>- SURVEI PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>Secara umum maksud Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) adalah untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas manusia terhadap permasalahan lingkungan dan perubahan iklim.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada perubahan iklim pada lingkungan rumah tangga.</li> <li>2. Menyajikan indikator perilaku peduli lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga);</li> <li>2. Para pembuat kebijakan;</li> <li>3. Akademisi dan peneliti;</li> <li>4. Masyarakat umum;</li> <li>5. Pihak swasta</li> </ol>
<p><b>- STUDI KETAHANAN RUMAH TANGGA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM</b></p> <p>Mengetahui hubungan antara perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan rumah tangga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga dari aspek sosial ekonomi terhadap perubahan iklim</li> <li>2. Memperoleh variabel-variabel yang relevan dan akurat yang menggambarkan tentang ketahanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>2. BNPB;</li> <li>3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);</li> <li>4. Kemenko Kesra;</li> </ol>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
	<p>rumah tangga akibat perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>3. Mengevaluasi proses pengambilan sampel rumah tangga</p> <p>4. Uji coba variabel kuesioner SKRTPI16</p> <p>5. Menggali kendala/hambatan dalam mengumpulkan data SKRTPI16</p> <p>6. Evaluasi hasil pencacahan</p>	<p>5. BMKG;</p> <p>6. LIPI;</p> <p>7. Perguruan Tinggi;</p> <p>8. Para pembuat kebijakan</p>
<p><b>- PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (IPB)</b></p> <p>Memberikan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi terakhir capaian indikator-indikator dalam pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>1. Menyajikan data dan informasi mengenai indikator-indikator pembangunan berkelanjutan</p> <p>2. Memberikan gambaran perbandingan capaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan antar daerah.</p>	<p>1. Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga);</p> <p>2. Para Pembuat Kebijakan;</p> <p>3. Akademisi dan peneliti;</p> <p>4. Masyarakat Umum</p>
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR (SDLP)</b></p> <p>Memberikan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi terakhir capaian data-data dalam pembangunan sumber daya laut dan pesisir.</p>	<p>Secara umum: untuk menyajikan data dan informasi tentang laut dan pesisir di Indonesia sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan, mengevaluasi dan menentukan program terkait laut dan pesisir. Publikasi ini juga dimaksudkan sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat luas.</p> <p>Secara khusus: untuk menyajikan isu terkait laut dan pesisir, kondisi fisik, sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, jasa kelautan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.</p>	<p>1. Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga);</p> <p>2. Para Pembuat Kebijakan;</p> <p>3. Akademisi dan peneliti;</p> <p>4. Masyarakat Umum</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK KEAMANAN</b></p> <p>Menyajikan data yang dapat memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah provinsi</p>	<p>Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu, dan Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.</p>	<p>pelajar dan mahasiswa; akademisi; kementerian dan lembaga pemerintahan; masyarakat umum</p>
<p><b>- SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI (PNBP BAPPENAS)</b></p> <p>Memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi anti korupsi masyarakat terkini dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia.</p>	<p>Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan Survei ini juga pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia mengukur sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi masyarakat umum kelima STRANAS PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi</p>	<p>pelajar dan mahasiswa; akademisi; kementerian dan lembaga pemerintahan;</p>
<p><b>- PENYELENGGARAN SURVEI DEMOKRASI INDONESIA (PNBP KEMENPOLHUKAM)</b></p> <p>Indeks dimaksudkan untuk mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi, sehingga indeks dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan di bidang politik pada level provinsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan perangkat penilaian yang sistematis dan obyektif mengenai pelaksanaan demokrasi.</li> <li>2. Mengidentifikasi tingkat pelaksanaan demokrasi (sangat buruk hingga sangat baik, atau sangat tidak memuaskan hingga sangat memuaskan).</li> <li>3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik demokrasi.</li> <li>4. Memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan untuk program-program penguatan demokrasi.</li> <li>5. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi</li> </ol>	<p>Pelajar dan mahasiswa; akademisi; kementerian dan lembaga pemerintahan; masyarakat umum</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI PERSEPSI RASA AMAN</b></p> <p>Menghasilkan indeks persepsi rasa aman yang bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai status/tingkat rasa aman masyarakat dan pola perkembangannya selama periode waktu tertentu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rasa aman individu</li> <li>2. Disusun indeks persepsi rasa aman sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan di masyarakat.</li> </ol>	<p>pelajar dan mahasiswa; akademisi; kementerian dan lembaga pemerintahan; masyarakat umum</p>
<p><b>- DATA DAN PENGHITUNGAN TINGKAT KEMISKINAN</b></p> <p>Informasi mengenai penduduk miskin baik pada tingkat nasional, propinsi, maupun Kabupaten/kota saat ini telah menjadi perhatian baik pemerintah maupun kalangan di luar pemerintah. Informasi ini sangat diperlukan khususnya dalam perencanaan pembangunan dan alokasi bantuan kepada penduduk miskin baik oleh pihak pemerintah, swasta maupun lembaga donor internasional. Untuk itu data dan informasi kemiskinan yang lengkap, akurat serta up to date mutlak diperlukan. Disamping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2015, baik pada tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada penghitungan data Susenas 2015.</li> <li>2. Menghitung Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada data Susenas 2014 dan Susenas 2015.</li> <li>3. Menyusun penghitungan tingkat kemiskinan tahun 2015 yang didasarkan pada data Susenas 2015.</li> </ol>	<p>Kementerian Sosial; Kemenko Kesra; Sekretariat Eksekutif Wakil Presiden/TNP2K; Bappenas; Perguruan tinggi;</p>
<p><b>2910 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN</b></p> <p><b>- SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN</b></p> <p>Tersedianya data produksi tanaman pangan dan data pendukung/data terkait seperti luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah, banyaknya alat/mesin pertanian, dan data perbenihan.</p>	<p>Mendapatkan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan Pangan,</li> <li>b. Produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan</li> </ol>	<p>Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Tanaman Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian/Pusdatin, dan Badan Litbang); Kementerian Koordinator Perekonomian;</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA, DAN PEMBENTUKAN KERANGKA SAMPEL AREA DI PULAU JAWA</b></p> <p>Memperbaiki akurasi dan aktualitas data estimasi produksi padi dan palawija sehingga lebih akurat, lebih cepat dan dan lebih obyektif.</p>	<p>c. Luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah  d. Banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan)  e. Keterangan tentang perbenihan</p> <p>a) Uji implementasi pendekatan kerangka sampel area untuk pengumpulan data produksi pertanian terintegrasi di Jawa Barat sebelum diimplementasikan di tingkat Nasional  b) Membangun sistem komunikasi data dari tingkat lapangan sampai ke tingkat pusat  c) Evaluasi implementasi KSA di Jawa Barat  d) Membangun Kerangka Sampel Area di Pulau Jawa sebagai persiapan kegiatan pada tahun 2017</p>	<p>Kementerian Perdagangan;  Badan Ketahanan Pangan (BKP); Bulog;  BAPPENAS;  Mensesneg;  Kementerian Keuangan;  Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;  Badan Intelijen Negara;  Sekretaris Kabinet;  World Bank;  FAO;  Lembaga penelitian pemerintah dan swasta</p> <p>Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian/Pusdatin, Badan Litbang);  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);  Bappenas;  BPN;  Kemeneke Perekonomian;  Dinas Pertanian Provinsi;  Dinas Pertanian Kabupaten/Kota</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI LUAS PANEN DAN LUAS LAHAN UNTUK PENGECEKAN KEAKURASIAN DATA PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI</b></p> <p>Tersedianya data luas panen dan luas lahan untuk pengecekan keakurasian data produksi padi, jagung dan kedelai dengan pendekatan rumah tangga di 7 provinsi sebagai pembandingan dengan existing dengan pendekatan area.</p>	<p>a. Mendapatkan data pembandingan luas panen dan luas lahan sehingga diperoleh angka konversi terhadap data existing</p> <p>b. Mendapatkan keterangan tentang luas tanam dan luas panen</p> <p>c. Mendapatkan informasi luas lahan sawah berdasarkan metode wawancara dan pengukuran di lapangan</p> <p>d. Mendapatkan angka konversi galengan</p> <p>e. Mendapatkan informasi pendukung terkait kegiatan usaha</p>	<p>Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian/Pusdatin, dan Badan Litbang); Kementerian Koordinator Perekonomian; Badan Ketahanan Pangan (BKP); Lembaga penelitian pemerintah dan swasta</p>
<p><b>- SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN</b></p> <p>Tersedianya data luas panen/tanaman menghasilkan dan produksi tanaman sayuran, buah-buahan, obat-obatan/ biofarmaka, dan tanaman hias dan data pendukung/data terkait lainnya</p>	<p>Mendapatkan data yang akurat mengenai luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah- buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan.</p>	<p>Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Hortikultura, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).; Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- PENGEMBANGAN DATA HORTIKULTURA POTENSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAME ST2013 PER KOMODITAS PER RUMAH TANGGA</b></p> <p>Tersedianya data produksi dengan menggunakan frame hasil ST2013 yang lengkap dan akurat dan memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga hortikultura potensi</p>	<p>a. mendapatkan keterangan tentang luas panen dan produksi.</p> <p>b. Memapatkan informasi luas panen berdasarkan metode wawancara</p> <p>c, Mendapatkan informasi pendukung terkait kegiatan usaha</p>	<p>Kementerian Pertanian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Perguruan Tinggi; Masyarakat umum yang membutuhkan data hortikultura</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN</b></p> <p>Memperoleh data komoditi perkebunan baik mengenai perkembangan produksi, struktur ongkos, hambatan yang ditemui maupun terhadap efisiensi pengelolaan kebun. Memperoleh Direktori perusahaan perkebunan yang mutakhir</p>	<p>Data yang dikumpulkan dalam survey tahunan dan triwulanan perusahaan perkebunan, meliputi nama dan alamat lengkap perusahaan , yaitu karet , kopi, kakao , kelapa sawit, kina, teh, tebu dan tembakau. Data yang dikumpulkan dalam survey tahunan perusahaan perkebunan (struktur ongkos perusahaan perkebunan) meliputi jenis tanaman yang dibudidayakan, penguasaan dan penggunaan lahan, produksi, struktur ongkos komoditi utama, tenaga kerja dan struktur pendapatan. Updating direktori perusahaan perkebunan dimaksudkan untuk memperoleh daftar nama dan alamat perusahaan perkebunan secara lengkap, akurat dan mutakhir serta memperoleh informasi jenis tanaman yang diusahakan dan luas tanaman.</p>	<p>Bappenas RI; Kementerian Pertanian RI; Peneliti; Mahasiswa; Masyarakat Umum</p>
<p><b>- IMPLEMENTASI PENGUMPULAN DATA KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS MELALUI RUMAH TANGGA</b></p> <p>1. Mendapatkan data statistik Pertanian Hortikultura dan perkebunan yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran struktur pertanian untuk komoditas strategis yang jelas di Indonesia,</p> <p>2. Memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga pertanian usaha komoditas strategis hortikultura dan perkebunan, jumlah pohon dan sebagainya.</p>	<p>1. Tersedianya data statistik Pertanian Hortikultura dan perkebunan yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran struktur pertanian untuk komoditas strategis yang jelas di Indonesia,</p> <p>2. Tersedianya berbagai informasi tentang populasi rumah tangga pertanian usaha komoditas strategis hortikultura dan perkebunan, jumlah pohon dan sebagainya.</p>	<p>Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian; Pelaku Usaha Peternakan (Perusahaan); Perguruan Tinggi;</p>



Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2909 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN</b></p> <p><b>- SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH</b></p> <p>Menyediakan data peternakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam bidang peternakan, baik daging, telur, maupun susu.</p>	<p>- untuk mendapatkan data struktur ongkos, produksi, pengolahan dan pemasaran, serta nilai tambah yang dapat digunakan dalam penghitungan PDB.</p> <p>- untuk mendapatkan jumlah ternak yang dipotong dan produksi daging yang dapat digunakan dalam penghitungan PDB.</p>	<p>Direktorat Bina rencana Pemanfaatan Hutan tanaman  Dirjen BPK, Kemehut;  Direktorat Bina rencana Pemanfaatan Hutan Produksi  Dirjen BPK, Kemehut;  Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, Kemenhut;  Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Badan Planologi, Kemenhut;  Direktorat Perlindungan Hutan dan konservasi alam, Kemenhut;  Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut;  Perguruan tinggi</p>
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP</b></p> <p>Melalui survei ini diharapkan dapat terbentuk direktori lengkap Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pelabuhan perikanan (PP)/pangkalan pendaratan ikan (PPI) di seluruh Indonesia, jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan penangkapan dan budidaya ikan sehingga data yang dihasilkan dapat berguna bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di sektor perikanan. - Merupakan salah satu upaya untuk memperluas/mengembangkan, dan mempertajam data statistik dibidang perikanan yang telah ada dan melengkapi informasi lain, sehingga diperoleh data yang lebih rinci, lengkap, akurat, relevan dan up to date.</p>	<p>- Pengumpulan data melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan (PP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) bertujuan untuk mendapatkan jumlah direktori TPI/PP/PPI, sistem penjualan ikan secara lelang/tidak lelang, jumlah perahu/kapal yang mendarat, dan besarnya produksi/nilai produksi ikan yang dijual melalui TPI/PP/PPI.</p> <p>- Pengumpulan data perusahaan budidaya/penangkapan ikan bertujuan untuk mendapatkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya/penangkapan ikan, Banyaknya produksi, pengeluaran produksi, pembentukan barang modal, dan banyaknya tenaga kerja.</p>	<p>Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).;  Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).;  Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan perikanan;  Direktorat jenderal KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan;  Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).;  Perpustakaan BAPPENAS;  Kepala Arsip Nasional</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN</b></p> <p>Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, yang dapat diperoleh dari survei perusahaan kehutanan, dapat disusun perencanaan dan kebijakan yang lebih terarah, sehingga diharapkan produksi hasil hutan terus meningkat tetapi kelestarian hutan tetap terjaga.</p>	<p>Mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat di subsektor kehutanan. Apabila tak ada data yang baik dan tepat waktu, maka perencana dan pengambil keputusan akan mengambil keputusan tanpa menggunakan dasar yang kuat, sehingga keputusan yang diambil bisa salah dan menimbulkan kekeliruan yang fatal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Perindustrian;</li> <li>2. Kementerian Perdagangan;</li> <li>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>4. Komisi Persaingan dan Perlindungan Usaha;</li> <li>5. BKPM;</li> <li>6. Kementerian ESDM;</li> <li>7. Perguruan Tinggi;</li> <li>8. Bank Indonesia</li> </ol>
<p><b>2904 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI</b></p>		
<p><b>- SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN</b></p> <p>Pemerintah mempunyai data yang dapat digunakan untuk tujuan pengambilan kebijakan</p>	<p>Memperoleh indeks produksi industri skala besar dan sedang bulanan dan triwulanan. Memperoleh indikator ini untuk melihat pertumbuhan sektor industri manufaktur</p> <p>Sebagai dasar acuan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di industri manufaktur</p> <p>Memperoleh data industri manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuatan kebijakan</p>	<p>Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Komisi Persaingan dan Perlindungan Usaha; BKPM; Kementerian ESDM; Perguruan Tinggi; Bank Indonesia; Swasta</p>
<p><b>- SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN</b></p> <p>Pemerintah mempunyai data yang dapat digunakan untuk tujuan pengambilan kebijakan</p>	<p>Memperoleh data industri manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuatan kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wakil Presiden</li> <li>2. Menko Perekonomian;</li> <li>3. Bank Indonesia;</li> <li>4. Kementrian Pertanian;</li> <li>5. Kementerian Koperasi dan UKM;</li> <li>6. Kementerian Perindustrian;</li> <li>7. Kementrian Perdagangan ;</li> <li>8. Lembaga riset dan penelitian UKM;</li> <li>9. Perguruan Tinggi</li> </ol>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TAHUNAN</b></p> <p>Mendapatkan gambaran keberadaan perusahaan/usaha Industri Mikro dan Kecil di Indonesia secara berkesinambungan</p>	<p>Mendapatkan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya unit usaha dan jenis usaha.</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja dan modal.</li> <li>- Biaya input dan jenis bahan baku yang digunakan.</li> <li>- Nilai output dan jenis komoditi yang dihasilkan.</li> <li>- Nilai tambah atas biaya produksi.</li> <li>- Kesulitan/hambatan dan prospek masing-masing usaha.</li> <li>- Berbagai informasi lain yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.</li> </ul>	<p>Badan Kebijakan Fiskal; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Badan Standarisasi Nasional; Balitbang Pusdatin dan Pusat kajian Perdagangan Kementerian Perdagangan</p>
<p><b>- SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN</b></p> <p>Mendapatkan informasi keberadaan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil di Indonesia secara kontinyu</p>	<p>Mengetahui perkembangan sektor industri mikro dan kecil secara umum dengan referensi waktu triwulanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia ;</li> <li>2. Menko Perekonomian ;</li> <li>3. Kementerian Perindustrian;</li> <li>4. Kementerian Perdagangan ;</li> <li>5. Kementerian Pertanian;</li> <li>6. Kementerian Koperasi dan UKM;</li> <li>7. Lembaga riset dan penelitian UKM;</li> <li>8. Perguruan Tinggi</li> </ol>
<p><b>- SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI</b></p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan direktori perusahaan pertambangan, energi dan penggalan yang up to date.</li> <li>- Mendapatkan data penyerapan tenaga kerja di masing-masing sub sektor pertambangan, energi dan penggalan.</li> <li>- Mendapatkan struktur biaya perusahaan secara umum</li> </ul>	<p>Kementrian ESDM ( Energi dan Sumber Daya Mineral); Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI KONSTRUKSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan data mengenai jumlah perusahaan konstruksi yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia serta peranannya dalam pembangunan.</li> <li>- Mendapatkan data mengenai penyebaran tenaga kerja, upah/gaji, struktur permodalan, pemakaian bahan, dan struktur</li> </ul>	<p>Mendapatkan data (informasi) yang akurat, rinci dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya.</p>	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Perum Perumnas; Badan Kordinasi Penanaman Modal; Bank Indonesia; Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP); Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN); Asosiasi Semen Indonesia (ASI); Asosiasi-Asosiasi Konstruksi; Real Estate Indonesia (REI); Perguruan Tinggi; BCI Asia</p>
<p><b>2902 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK DISTRIBUSI</b></p> <p><b>- KOMPILASI DATA STATISTIK EKSPOR</b></p> <p>Untuk menghasilkan data ekspor yang tepat waktu, akurat, dan terpercaya. Karena data statistik ekspor merupakan salah satu indikator ekonomi nasional bagi pemerintah dan indicator perdagangan bagi dunia usaha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menghasilkan data ekspor setiap bulan yang dirinci menurut komoditi, negara tujuan, dan pelabuhan muat, baik volume maupun nilai.</li> <li>- Untuk menghasilkan angka sementara, angka ekspor bulanan untuk dilaporkan dalam Pers Release dan Sidang Menko Perekonomian</li> </ul>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Badan Kebijakan Fiskal; Lembaga Internasional; Kemendag</p>
<p><b>- PENDATAAN EKSPOR DILUAR DOKUMEN BEA CUKAI</b></p> <p>Pendataan ekspor di luar catatan Bea Cukai diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja ekspor. Hal ini dapat digunakan juga sebagai bahan penyempurnaan penghitungan PDB Indonesia maupun PDRB Provinsi/Kabupaten.</p>	<p>Memperoleh angka ekspor diluar catatan Bea Cukai selama 1 tahun</p>	<p>Pemerintah; Swasta; Masyarakat Luas</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- PEMBUATAN DATABASE EKSPORTIR DAN PEMBELI LUAR NEGERI</b></p> <p>Menentukan Metodologi Survei Ekspor Jasa yang feasible sesuai dengan rekomendasi UNSD dalam (Manual Statistic of International Trade Services) MSITS</p>	<p>Mendapatkan Metodologi Survei ekspor jasa yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.</p>	<p>Balitbang Pusdatin dan Pusat kajian Perdagangan Kementerian Perdagangan; Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif; Pusdatin Kementerian Perindustrian;</p>
<p><b>- PENINGKATAN KUALITAS PENGISIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)</b></p> <p>Dengan adanya pembinaan ini diharapkan para eksportir dan pengusaha PPJK bisa lebih baik dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan benar dan tepat.</p>	<p>- Untuk menghasilkan data ekspor dan impor setiap bulannya lebih akurat sesuai kenyataan. - Untuk meningkatkan kualitas Publikasi Statistik Ekspor yang Jenis Publikasinya antara lain ekspor menurut kelompok barang, ekspor menurut kode HS</p>	<p>Badan Kebijakan Fiskal; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Balitbang (Pusdatin dan Pusat Kajian Perdagangan Kementerian Perdagangan); Bank Indonesia</p>
<p><b>- PILOT STUDI STATISTIK EKSPOR JASA</b></p> <p>menentukan metodologi survei ekspor jasa yang feasible sesuai dengan rekomendasi UNSD dalam (manual statistic of internationa trade services)MSITS</p>	<p>mendapatkan metodologi survei ekspor jasa yang sesuai dengan kondisi di Indonesia</p>	<p>balitbang; pusdatin dan pusat kajian perdagangan kementerian perdagangan; kementerian pariwisata dan industri kreatif; pusdatin kementerian perindustrian</p>
<p><b>- SURVEI IMPOR DAERAH PERBATASAN</b></p> <p>Memperbaiki dan menyempurnakan ruang lingkup dan metode pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data impor</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas, memperbaiki, dan melengkapi data statistik Perdagangan luar negeri Indonesia. 2. Menyajikan data yang menggambarkan karakteristik perdagangan di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Papua New guinea baik perbatasan darat maupun laut.</p>	<p>Kementrian Perdagangan; Bank Indonesia; Bea dan Cukai; Imigrasi;</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- KOMPILASI DATA STATISTIK IMPOR</b></p> <p>Untuk menghasilkan data impor yang tepat waktu, akurat dan terpercaya. Karena data statistik impor merupakan data yang banyak ditunggu oleh pengguna data dan merupakan salah satu indikator ekonomi nasional bagi pemerintah dan indikator perdagangan bagi dunia usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki dan menyempurnakan ruang lingkup dan metode pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data impor,</li> <li>2. Menyusun dan menyajikan data impor menurut jenis barang (HS dan SITC), negara asal, pelabuhan bongkar dan golongan penggunaan barang,</li> </ol>	<p>Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; UN Comtrade; IMF; Pihak Swasta; Akademika/Mahasiswa</p>
<p><b>- PILOT SURVEI IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG 2016</b></p> <p>Survei ini dimaksudkan agar Indonesia mampu menghasilkan barang-barang pengganti barang impor dengan pasar yang fokus, yakni sebagai bahan baku/penolong industri manufaktur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui komoditas impor bahan baku/penolong pada sektor industri.</li> <li>2. Mengetahui persentase penggunaan impor bahan baku/penolong pada sektor industri.</li> <li>3. Mengetahui ketersediaan komoditas lokal yang mempunyai potensi sebagai substitusi impor.</li> <li>4. Mengidentifikasi kualitas bahan baku/penolong impor yang dibutuhkan perusahaan Industri.</li> <li>5. Membuat peta kebutuhan komoditas-komoditas substitusi impor.</li> </ol>	<p>Instansi Pemerintah</p>
<p><b>- SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI</b></p> <p>Memenuhi kebutuhan indikator maupun perkembangan usaha secara triwulanan pada kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor</li> <li>2. Transportasi dan pergudangan</li> <li>3. Lembaga keuangan bukan bank (untuk KBLI tertentu)</li> <li>4. Jasa informasi (untuk KBLI tertentu)</li> <li>5. Kegiatan keuangan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan data tentang indeks nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi, serta sektor keuangan yang berkesinambungan (triwulanan)</li> <li>2. Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan PDB dan PDRB Triwulanan</li> <li>3. Memperoleh informasi terkini dan tercepat dalam bentuk data kuantitas mengenai indikator produksi triwulanan dan data kualitas sebagai pendukung data kuantitas</li> </ol>	<p>Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas); Peneliti; Perguruan Tinggi; Masyarakat Pengguna Data</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI</b></p> <p>Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah pada pelakunya. Sementara itu, pola distribusi barang kebutuhan masyarakat saat ini diduga masih bermasalah. Hal ini terlihat dari melambungnya harga barang kebutuhan masyarakat, serta kelangkaan barang tersebut di beberapa daerah. Selain itu, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga) dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang. Untuk mengetahui dimana letak permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi.</p>	<p>a. Mendapatkan Pola Penjualan Produksi.  b. Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan.  c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.  d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.  e. Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.</p>	<p>Kementerian Perdagangan RI;  Kementerian Perindustrian RI;  Kementerian Kelautan RI;  Asosiasi-asosiasi perdagangan yang berhubungan dengan komoditi terpilih;  Para peneliti, akademisi, dan mahasiswa;</p>
<p><b>- PENYUSUNAN DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN</b></p> <p>Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan, sektor keuangan,</p>	<p>a. Mendapatkan daftar nama dan alamat pasar/sentra perdagangan di seluruh Indonesia  b. Mendapatkan jumlah perusahaan/usaha perdagangan yang berada di pasar/sentra perdagangan  c. Mendapatkan jumlah pasar menurut jenisnya  d. Mendapatkan kerangka sampel perdagangan</p>	<p>1. Kementerian Perdagangan;  2. Direktorat Bina Pasar;  3. Asosiasi terkait</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p>sektor perhubungan/transportasi dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan perdagangan lebih banyak dilakukan di pasar, oleh karena itu perlu disusun direktori pasar yang mutakhir sebagai kerangka sampel survey perdagangan.</p>		
<p><b>- STUDI INVENTARISASI SUMBER INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN STATISTIK PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH</b></p> <p>Untuk menginventarisir sumber informasi sehingga memperoleh data indikator perdagangan antar wilayah (provinsi) pada sektor perdagangan yang diteliti secara lengkap dan berkesinambungan untuk mendukung penghitungan PDB/PDRB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan data tentang nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, ekspor impor antar wilayah/provinsi yang berkesinambungan.</li> <li>2. Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan PDB dan PDRB.</li> <li>3. Memperoleh informasi terkini dalam bentuk data kuantitas mengenai indikator produksi dan data kualitas sebagai pendukung data kuantitas.</li> </ol>	<p>Kementerian Perdagangan; Kementerian Perhubungan; Bank Indonesia; Asosiasi terkait</p>
<p><b>- SURVEI WAKTU TUNGGU (DWELLING TIME) DI PELABUHAN</b></p> <p>BPS melalui Subdit Stat Transportasi melakukan penghitungan dwelling time secara periodik di pelabuhan dalam rangka mendukung dashboard dwelling time nasional.</p>	<p>Menyediakan data dwelling time impor/ekspor dan dwelling time domestik(antar pulau) secara periodik.</p>	<p>Pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan pemerintah; Dunia usaha</p>
<p><b>- KOMPILASI DATA TRANSPORTASI</b></p> <p>sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang transportasi, baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah</p>	<p>Menyediakan data angkutan darat, laut dan udara secara periodik dan berkesinambungan dalam (i) Berita Resmi Statistik (BRS) dan Buletin Statistik</p>	<p>Pemerintah Republik Indonesia; Masyarakat pengguna data</p>



Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
Kabupaten/Kota, maupun nasional.	Bulanan Indikator Ekonomi yang disajikan bulanan, (ii) Publikasi Statistik Perhubungan dan Publikasi Statistik Indonesia yang disajikan tahunan, maupun (iii) penyajian dalam bentuk lainnya, seperti penyajian dalam website.	
<p><b>- SURVEI ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI TERMINAL DAN JEMBATAN TIMBANG</b></p> <p>Mengetahui pergerakan penumpang dan barang di Indonesia melalui terminal dan jembatan timbang.</p>	Mendapatkan data atau informasi mengenai arus penumpang dan barang angkutan jalan.	Para K/L/Instansi terkait angkutan jalan; Para pengguna jalan; Dunia usaha
<p><b>- SURVEI DISTRIBUSI BARANG ANGKUTAN LAUT</b></p> <p>Memperhatikan kebutuhan informasi mengenai arus barang antar pulau yang sangat mendesak dalam menyusun kebijakan pengembangan jaringan distribusi barang, dan perlu diupayakan informasi pada skala nasional dan tetap terjamin pengadaannya. Oleh karena itu sangat diperlukan data arusbarang yang bersumber dari hasil pengolahan dokumen voyage report (laporan perjalanan kapal).</p>	Menyajikan arus barang menurut pelabuhan asal dan tujuan yang dirinci menurut golongan/kelompok barang, type kapal dan jenis kemasan yang digunakan.	Kementerian Perdagangan, Bapennas, dan lembaga K/L Lainnya; Dunia Usaha
<p><b>- STUDI LITERATUR DALAM RANGKA MEMBAHAS KONSEP DAN DEFINISI, CAKUPAN, DAN METODOLOGI BIAYA LOGISTIK</b></p> <p>Membahas dan mencari konsep, definisi, cakupan, dan metodologi biaya logistik.</p>	Merancang instrumen yang dapat menampung informasi/data biaya logistik di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya biaya logistik.	Pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan pemerintah; Dunia usaha
<p><b>- PUBLISITAS SE2016</b></p> <p>Masyarakat luas dapat mengetahui urgensi ketersediaan data dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan keadaan terkini</p>	Memberikan penjelasan secara rinci tentang kegiatan SE2016 serta pemanfaatan statistik ekonomi yang dihasilkan bagi semua kalangan, baik	pemerintah; pengusaha/swasta; masyarakat

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p>sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran pelaksanaannya. Data yang dihasilkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang dilakukan sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>para pelaku ekonomi, pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas</p>	
<p><b>- LISTING USAHA/PERUSAHAAN</b></p> <p>1. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan kuesioner, organisasi lapangan dan metodologi yang telah direvisi berdasarkan hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing Sensus Ekonomi 2016</p> <p>2. Mendeteksi dini permasalahan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016</p>	<p>1. Uji cobakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang merupakan penyempurnaan dari hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing</p> <p>2. Metodologi pencacahan baik listing maupun sampel</p> <p>3. Meneliti tingkat keakuratan hasil pelaksanaan lapangan dan melihat efektifitas petugas</p>	<p>Kementerian Perindustrian; Menko Perekonomian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Kominfo; Kementerian Perhubungan; Kementerian ESDM; Kementerian Koperasi</p>
<p><b>- GLADI BERSIH PENCACAHAN UMK DAN UMB SENSUS EKONOMI 2016</b></p> <p>1. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan kuesioner, organisasi lapangan dan metodologi yang telah direvisi berdasarkan hasil Uji Coba/Gladi Kotor Pencacahan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016</p> <p>2. Mendeteksi dini permasalahan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016</p>	<p>1. Uji cobakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang merupakan penyempurnaan dari hasil Uji Coba/Gladi Kotor Pencacahan UMK dan UMB</p> <p>2. Meneliti tingkat keakuratan hasil pelaksanaan lapangan dan melihat efektifitas petugas</p>	<p>Kementerian Pertanian; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Bappenas; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Bulog; Bank Indonesia; Lembaga konsultan/penasihat keuangan; Pengusaha/Kontraktor/Rekanan Supplier; Perguruan Tinggi; Asosiasi</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<b>2903 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK HARGA</b>		
<b>- SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN</b>		
<p>Memperoleh data guna penghitungan Indeks Harga Produsen (IHP) atau Producer Price Index (PPI).</p>	<p>Mendapatkan data harga di tingkat produsen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.</p>	<p>Bank Indonesia; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Pengawasan Persaingan Usaha; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Instansi Pemerintah Lainnya; Pengusaha kontraktor; Peneliti dan mahasiswa</p>
<b>- INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI</b>		
<p>-</p>	<p>mendapatkan harga masing-masing bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi sebagai dasar penghitungan Indeks Kemalan Konstruksi kabupaten/kota dan provinsi.</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat RI; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Tk 1 dan Tk 2; Mahasiswa; Peneliti; Konsultan;</p>
<b>- SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR</b>		
<p>Menyajikan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Indikator Ekonomi yang diterbitkan oleh BPS. Di samping itu juga diterbitkan dan indikator harga publikasi seri tahunan untuk Indeks Harga Perdagangan Besar. Penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar tingkat Provinsi juga akan dilakukan untuk menunjang penghitungan PDRB dan keperluan statistik lainnya yang dimulai dengan studi diagram timbangnya pada tahun 2015</p>	<p>Mendapatkan data harga perdagangan besar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan indeks harga lainnya, guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka Badan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional maupun wilayah.</p>	<p>Bank Indonesia; Badan Pemeriksa Keuangan; Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Komisi Pengawasan Persaingan Usaha; Instansi Pemerintah Lainnya; Pengusaha kontraktor; Peneliti dan mahasiswa;</p>
<b>- STUDI PENGEMBANGAN KUALITAS DATA IKK</b>		
<p>Memberikan gambaran yang jelas terhadap keterbatasan survei IKK yang selama ini dilakukan. Survei ini merupakan studi mendalam</p>	<p>a. Melakukan evaluasi data harga barang konstruksi yang digunakan untuk penghitungan IKK. b. Melakukan pengecekan lapangan untuk harga-</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat RI; Kementerian Keuangan; harga Kementrian Dalam Negeri;</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p>terhadap data yang dianggap ekstrim. Selain itu, survei ini juga meneliti tentang diagram timbang IKK untuk menentukan diagram timbang yang paling optimal yang dapat mengakomodir keragaman konstruksi di Indonesia.</p>	<p>harga barang yang dianggap tidak wajar (ekstrim). c. Melakukan evaluasi data BoQ yang digunakan sebagai bobot IKK dan mengkaji bobot yang paling mewakili dalam penghitungan IKK. d. Mengkaji metode CPD yang digunakan untuk penghitungan IKK.</p>	<p>Pemerintah Daerah Tk 1 dan Tk 2; Mahasiswa; Peneliti; Konsultan</p>
<p><b>- SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG IHPB PROVINSI</b></p> <p>Mendapatkan diagram timbang IHPB murni dari data primer.</p>	<p>a. Mendapatkan diagram timbang IHPB Subnasional di 32 provinsi b. Mendapatkan diagram timbang IHPB Nasional c. Mendapatkan sampel untuk IHPB Nasional dan Subnasional</p>	<p>Bank Indonesia; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Pengawasan Persaingan Usaha; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Instansi Pemerintah Lainnya; Pengusaha kontraktor; Peneliti dan mahasiswa</p>
<p><b>- SURVEI HARGA KONSUMEN DAN SURVEI VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS</b></p> <p>Mmemperoleh gambaran perkembangan harga eceran barang dan jasa dari waktu ke waktu serta pergeseran dan perubahan kualitas-kualitas yang diminati masyarakat dari setiap barang dan jasa tersebut.</p>	<p>1. Data harga eceran barang dan jasa secara harian, mingguan, dwimingguan, dan bulanan 2. Data bobot kualitas komoditas beras, bensin, solar, bahan bakar rumah serta komoditas spesifik lainnya 3. Data perubahan harga eceran bahan pokok 4. Indikator IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi</p>	<p>Presiden RI; Wakil Presiden RI; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; tangga, tarif tenaga listrik, uang sekolah, tarif sewa dan kontrak rumah, Kementerian Sekretaris Negara; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Sekretaris Kabinet; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Perum BULOG; Bank Indonesia</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- UJI COBA SBH2017</b></p> <p>Menangkap informasi perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak perubahan kondisi sosial dan ekonomi.</p>	<p>Memperoleh paket komoditas, diagram timbang, dan nilai konsumsi tahun dasar terkini sebagai data pokok perhitungan IHK.</p>	<p>Presiden RI; Wakil Presiden RI; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Sekretaris Negara; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Sekretaris Kabinet; Kementerian Keuangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Perum BULOG; Bank Indonesia</p>
<p><b>- SURVEI HARGA PERDESAAN</b></p> <p>Mendapatkan data harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan harga konsumen perdesaan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.</p>	<p>Memperoleh indeks harga dan indikator harga lainnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang perencanaan dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya pertanian. Menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Indikator Ekonomi, dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE). Disamping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.</p>	<p>Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perekonomian; Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten; Bappenas; Mahasiswa/peneliti</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- UJI COBA NTP2017</b> Menghitung Nilai Tukar Perusahaan Pertanian</p>	<p>a. Memperoleh nilai produksi dan jenis komoditas yang banyak dihasilkan perusahaan pertanian subsektor perikanan dan kehutanan beserta persentase marketed surplusnya. b. Memperoleh nilai konsumsi dan biaya produksi serta komoditas yang banyak di gunakan perusahaan, baik untuk keperluan perusahaan maupun digunakan dalam proses produksi. c. Menyusun struktur input untuk setiap komoditas serta rasio biayaproduksi terhadap total produksi. d. Sebagai bahan untuk menyusun paket komoditas diagram timbang NTPPerusahaan.</p>	<p>Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perekonomian; Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten; Bappenas; Mahasiswa/peneliti</p>
<p><b>- UPDATING SURVEI PENYEMPURNAAN DIAGRAM TIMBANG NTP 2017</b> Memotret komoditas produksi pertanian di tiap rumahtangga tani dan pola pendapatan rumahtangga tani terkini, sehingga lebih relevan untuk digunakan dalam pengambilan sampel pada SPDT NTP 2017.</p>	<p>a. Memperoleh kerangka sampel rumahtangga di tiap provinsi perkomoditi yang baru untuk penarikan sampel rumahtangga tani per komoditi menggantikan kerangka sampel hasil ST2013 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan komoditas produksi pertanian tiap rumahtangga dan pola pendapatan rumahtangga tani di perdesaan. b. Memperbaharui kerangka sampel hasil ST2013 dengan kerangka sampel baru 2017, sehingga diperoleh kerangka rumah tangga sampel yang lebih akurat.</p>	<p>Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perekonomian; Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten; Bappenas; Mahasiswa/peneliti</p>
<p><b>2908 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA</b> <b>- STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN</b> Untuk memperoleh informasi tentang: a. Karakteristik masing-masing kegiatan usaha sektor lembaga keuangan</p>	<p>- Mendapatkan struktur dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan masing- masing jenis perusahaan.</p>	<p>Perguruan Tinggi</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p>b. Transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba setiap kegiatan lembaga keuangan.</p>	<p>- Mendapatkan data mengenai transaksi finansial yang dilakukan oleh sub sektor Lembaga Keuangan. - Memperoleh data tentang produktivitas dan biaya-biaya yang diperlukan</p>	
<p><b>- SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL</b></p>	<p>1) Menyusun direktori perusahaan BUMN dan BUMD. 2) Menyediakan data statistik keuangan BUMN dan BUMD. 3) Menyajikan gambaran tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan negara dan daerah dalam mengelola sumber yang ada. 4) Menyajikan agregasi indikator perusahaan. 5) Menyajikan kurs jual dan beli valuta asing di 33 provinsi 6) Menyajikan data statistik Pasar Modal</p>	<p>Perguruan Tinggi; Peneliti; Badan Usaha</p>
<p><b>- SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p>1) Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah, dan penggunaannya untuk belanja daerah 2) Mendapatkan data Aktifitas Pemerintahan Desa melalui Keuangan Desa</p>	<p>Kementrian Dalam Negeri; Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi</p>
<p><b>- SURVEI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b></p>	<p>Mendapatkan informasi tentang: (a) perusahaan yang menggunakan komputer, (b) perusahaan yang menggunakan sarana TIK (wireless LAN, wirebased LAN, intranet dan ekstranet),</p>	<p>Masyarakat pengguna data Statistik TIK; Pemerintah; Pelaku usaha; APJI; Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
kegiatan TIK (d) Menjadi indikator dini dalam menentukan banyaknya perusahaan yang menggunakan sarana TIK (komputer, akses internet, transaksi atau pemesanan barang melalui internet, dan sebagainya)	(c) perusahaan yang mengakses internet, pegawai/karyawan yang bekerja dengan menggunakan internet, (d) perusahaan yang mempunyai website/home page.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
<b>- SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA</b>		
	1. Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) adalah untuk mengumpulkan data : a. Tingkat penghunian kamar hotel, bulanan b. Banyaknya kamar terjual/terpakai, bulanan c. Lama tamu menginap/bermalam, bulanan 2. Survei Usaha Hotel dan Akomodasi adalah untuk mengumpulkan data : a. Pertumbuhan jumlah hotel, tahunan b. Jumlah tenaga kerja usaha akomodasi, tahunan c. Jumlah kamar dan tempat tidur usaha akomodasi, tahunan 3. Tujuan pengumpulan data Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah untuk mengumpulkan data : a. Banyaknya penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri b. Banyaknya penduduk pelintas batas c. Banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia d. Banyaknya negara asing yang tinggal di Indonesia Sasaran utama pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh data jumlah wisman yang datang ke Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri di 103 pintu masuk (UPT imigrasi) yang telah ditetapkan oleh Ditjen. Imigrasi. Penyajian data dilakukan secara tahunan	Kementrian Pariwisata Dinas Pariwisata Kantor Imigrasi Perpustakaan Nasional Lembaga Asosiasi (ASITA, dll); ASEAN Sekretariat; Bank Indonesia (BI); Lembaga Masyarakat; Pemerintah Daerah; UNDP Jakarta; Perguruan Tinggi; warga World Bank; Public Information Assistant International Labour Organization; Perpustakaan LIPI; Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI); Lembaga Masyarakat; Pengusaha



Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>2899 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK NERACA PRODUKSI</b>  <b>- PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP BARANG)</b>  Menghitung/menghasilkan data Nilai Tambah menurut lapangan usaha khususnya barang triwulanan untuk skala nasional.</p>	<p>dan dirinci menurut berbagai karakteristik, seperti kebangsaan dan jenis visa. 4. Survei Restoran/Rumah Makan adalah untuk mengumpulkan data : a. Pertumbuhan jumlah usaha restoran/rumah makan, tahunan b. Jumlah tenaga kerja usaha restoran/rumah makan, tahunan c. Banyaknya tamu yang datang, tahunan 5. Tujuan Survei Statistik SPA adalah untuk mengumpulkan data : a. Banyaknya usaha SPA c. Banyaknya pengunjung d. Pertumbuhan jumlah usaha SPA di</p> <p>1) Ketersediaan indikator produksi barang sebagai data dasar yang mendukung penghitungan Nilai tambah lapangan usaha barang triwulanan.  2) Ketersediaan pola musiman (pola kegiatan) yang representatif bagi penyusunan dan penghitungan nilai tambah lapangan usaha barang triwulanan.  3) Penyiapan informasi kualitatif berkaitan dengan kecenderungan perubahan ekonomi sektoral.  4) Memperoleh informasi pendukung lainnya dalam rangka penyusunan PDB triwulanan.</p>	<p>instansi terkait</p>
<p><b>2896 PENGEMBANGAN DAN ANALISIS STATISTIK</b>  <b>- INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN</b>  Untuk menyusun dan menganalisis Sistem Pemantauan Indikator Dini melalui Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Mendatang.</p>	<p>Untuk menyusun dan menganalisis Sistem Pemantauan Indikator Dini melalui Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen.</p>	<p>1. Dunia Usaha;  2. Pemerintah;  3. Peneliti/Perguruan Tinggi</p>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p><b>- FORUM MASYARAKAT STATISTIK (FMS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan saran dan pertimbangan dalam berbagai aspek di bidang statistik baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang dapat diberikan secara berkala atau sewaktu-waktu,</li> <li>b. memberikan saran mengenai jenis statistik yang perlu dihasilkan untuk mendukung pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat,</li> <li>c. memberikan saran tentang penyempurnaan Sistem Statistik Nasional agar semakin andal, efektif, dan efisien,</li> <li>d. mengusulkan perbaikan, perluasan dan peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan statistik dan pembinaan statistik,</li> <li>e. memberikan evaluasi tentang mutu data yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik serta memberikan saran penyempurnaannya,</li> <li>f. memberikan masukan dan evaluasi tentang metodologi statistik, konsep, definisi dan klasifikasi yang digunakan dalam menghasilkan data statistik ekonomi, sosial dan statistik lainnya,</li> <li>g. memberikan evaluasi dan masukan-masukan mengenai makna data statistik yang dipublikasikan,</li> <li>h. memberikan saran tentang pelayanan statistik dan pemanfaatan statistik secara optimal,</li> <li>i. memberikan saran desiminasi data, baik</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pemerintah;</li> <li>2. pakar;</li> <li>3. praktisi;</li> <li>4. tokoh masyarakat</li> </ul>

Kegiatan/ Aktivitas/ Maksud	Tujuan	Penerima Manfaat (Eksternal BPS)
<p>dalam bentuk media cetak maupun media elektronik secara lebih efektif,</p> <p>j. menyusun laporan tahunan yang menyangkut segala hal yang dilaksanakan.</p> <p><b>- PENGEMBANGAN MODEL STATISTIK</b></p> <p>Pengembangan model statistik sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi di Indonesia sehingga dapat dirumuskan suatu kebijakan yang matang baik untuk periode saat ini maupun mendatang.</p>	<p>1) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena sosial ekonomi di Indonesia.</p> <p>2) Melakukan simulasi terhadap model yang telah dibangun untuk melihat efektifitas kebijakan pembangunan yang di ambil di masa mendatang</p>	

**DATA MENCERDASKAN BANGSA**